

Bidik Prestasi 2027, SMA Negeri 1 Baubau Matangkan Persiapan Siswa Hadapi OSN, O2SN dan FLS3N 2027



OSN hingga FLS3N 2027, Samsuriati AH Pacu
Persiapan Siswa SMA Negeri 1 Baubau Menuju Kompetisi 2027

KORAN BAUBAU POST
www.durasitimes.com

Laporan: Firman

BAUBAU, BP -SMA Negeri 1 Baubau mulai mematangkan persiapan menghadapi tiga ajang kompetisi siswa tingkat kabupaten/kota yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027. Sekolah menyiapkan pembinaan, program latihan, serta kebutuhan pendukung untuk Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N).

Kepala SMA Negeri 1 Baubau, Sam-

suriati AH, S.Pd., M.M., mengatakan pembinaan telah dimulai sejak Oktober 2026 dengan frekuensi satu kali dalam sepekan hingga November. Tahap awal ini difokuskan pada pendampingan siswa oleh pembina yang telah ditetapkan sesuai bidang kompetisi.

“Langkah awal adalah memilih pembina. Setelah pembina terpilih, mereka akan melaksanakan pembinaan kepada peserta didik yang mengikuti lomba,” kata Samsuriati saat diwawancarai Baubau Post, Ju-

Lanjut ke Hal: 7



Kepala SMPN Satap 20 Buteng Janji Segera Ganti Kusen Usai Temuan Disdikbud Yang Hanya Dicat, Revitalisasi Rp575 Juta Disorot



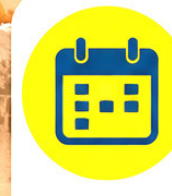
ANGGARAN REVITALISASI
Rp575.597.000



TEMUAN DISDIKBUD
Kusen pintu dan jendela diduga tidak diganti, hanya dicat ulang.



SASARAN PEKERJAAN
Dua bangunan dengan total empat ruang kelas belajar (RKB).



TINDAK LANJUT
Kepala sekolah berjanji mengganti kusen dengan material baru. Disdikbud menjadwalkan pemeriksaan ulang pada November 2026.

Laporan: ARDI, Baubau Post-Durasi Times

BUTON TENGAH, BP-Dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam program revitalisasi SMP Negeri Satu Atap (Satap) 20 Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara, mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat menjadwalkan pemeriksaan ulang pada pekan pertama November 2026. Program senilai Rp575.597.000 itu mencakup rehabilitasi dua bangunan dengan empat ruang kelas belajar, tetapi kusen pintu dan jendela pada salah satu bangunan diketahui masih menggunakan material

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdikbud Buteng, Dr. La Ode Amaluddin, turun memeriksa sekolah pada Selasa (20/10/2026) setelah menerima aduan masyarakat men-

Lanjut ke Hal: 7

Pesta Adat Ma'acia Digelar, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Serukan Pelestarian Budaya Lokal



Festival Burangasi 2026, Bupati Buton Selatan Ajak Warga Jaga Warisan Budaya

KORAN BAUBAU POST
www.durasitimes.com

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP -Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., mengajak masyarakat, warga perantauan, dan wisatawan untuk memeriahkan Pesta Adat Ma'acia dan Festival Budaya Burangasi 2026 yang digelar

Lanjut ke Hal: 7

Buton Selatan Gelar Pangan Murah, Beras SPHP 5 Kilogram Dijual Rp57 Ribu



Tekan Inflasi, Buton Selatan Gelar Pangan Murah dengan Beras SPHP 3 Ton

KORAN BAUBAU POST
www.durasitimes.com

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di Gedung Lamaindo, Kecamatan Batauga, Kamis (22/10/2026), dengan menyediakan sejumlah kebutuhan pokok di bawah harga pasar. Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga pangan, dan mendukung pengendalian inflasi daerah dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026.

Melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), pemerintah daerah menyediakan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seharga Rp57.000 per kemasan 5 kilogram, Minyakita Rp29.000 per 2 liter, telur ayam Rp53.000 per rak, gula pasir Rp16.000 per kilogram, bawang merah Rp27.000 per kilogram, serta bawang putih Rp38.000 per kilogram.

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Buton Selatan, Nurdin Mardani, S.Hut., M.Si.,

mengatakan panitia menyiapkan 3 ton beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap kepala keluarga diperbolehkan membeli maksimal 15 kilogram. Nurdin menyampaikan hal tersebut mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sadidi, S.Sos., M.Si.

“Gerakan Pangan Murah ini didukung oleh Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, Perum Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah,” kata Nurdin kepada Baubau Post.

Lanjut ke Hal: 7

Konektivitas Siompu-Kadatua Diperkuat Sebagai Respon Bupati Buton Selatan H Muh Adios Jawab Keluhan Warga, KMP Prima

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menyiapkan pengoperasian KMP Prima Satu untuk mengatasi keterbatasan armada penyeberangan yang selama ini menyebabkan penumpang dan kendaraan tertahan di pelabuhan. Kapal berukuran gross tonnage (GT) lebih besar itu diproyeksikan memperkuat konektivitas Pulau Siompu dan Kadatua, sekaligus memperlancar distribusi



Bupati H Muh Adios Respons Keluhan Warga, KMP Prima Satu Disiapkan, Buton Selatan Benahi Konektivitas Antarpulau

KORAN BAUBAU POST
www.baubaupost.com

barang dan kebutuhan pokok masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan Buton Selatan, La Ode Muham-

mad Ilmayang Amli, S.H., mengatakan, penambahan kapal merupakan respons

Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adi-

Lanjut ke Hal: 7

Prabowo Gelontorkan Rp240 Miliar untuk Kendalikan Karhutla di Kalbar



Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bantuan Presiden Rp240 miliar untuk penanganan karhutla di Kalbar, disalurkan dalam dua tahap.

Laporan: Alwan

KETAPANG, BP- Pemerintah daerah di Kalimantan Barat (Kalbar) mendapat alokasi bantuan Presiden sebesar Rp240 miliar untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dana yang disalurkan melalui dua tahap itu diharapkan memperkuat upaya pengendalian kebakaran di provinsi yang masuk dalam enam wilayah prioritas penanganan karhutla nasional.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan penyaluran bantuan tersebut dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Ketapang, Kalimantan Barat, Jumat (23/10/2026). Pertemuan yang berlangsung secara luring dan daring itu membahas penanganan kebakaran dengan mempertimbangkan kondisi serta tingkat eskalasi di setiap daerah.

Dari total bantuan Rp240 miliar, sebanyak Rp200 miliar telah disalurkan pada tahap pertama kepada Pemerintah Provinsi Kalbar dan 10 kabupaten/kota. Pemerintah kemudian men-

gajukan tambahan bantuan untuk daerah yang belum memperoleh alokasi awal.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan bantuan bagi empat kabupaten, yakni Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau. Menurut Raja Juli, dana tambahan tersebut telah masuk ke rekening pemerintah daerah masing-masing sekitar dua hari sebelum ia menyampaikan keterangan.

"Jadi total bantuan Presiden untuk penanganan karhutla dalam bentuk Banpres total Rp240 miliar," kata Raja Juli dalam keterangan tertulis.

Raja Juli meminta para kepala daerah memanfaatkan dana tersebut secara maksimal dan sesuai peruntukannya. Penggunaan anggaran, kata dia, harus mengikuti ketentuan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri agar bantuan mendukung kebutuhan penanganan karhutla di wilayah masing-masing.

"Jadi supaya bupati bisa memanfaatkan secara maksimum apa yang sudah diberikan ini ses-

uai dengan peruntukannya sesuai dengan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Pak Mendagri," ujarnya.

Bantuan yang dikelola pemerintah daerah itu berbeda dari dukungan operasional pemerintah pusat. Penanganan karhutla oleh BNPB, BMKG, Kementerian Kehutanan, serta kementerian dan lembaga terkait juga mencakup operasi modifikasi cuaca (OMC) dan pemadaman melalui pengeboman air atau water bombing.

Dalam rapat koordinasi tersebut hadir Gubernur Kalbar Ria Rosa, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen Budi Irawan, Direktur Modifikasi Cuaca Edison Kurnia, Kapolda Kalbar Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar, Dandim 1203 Letkol Inf Zulkarnaen Galib, dan Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama.

Secara historis, karhutla merupakan persoalan berulang di Indonesia, terutama ketika musim kering meningkatkan kerentanan lahan dan vegetasi terhadap api. Keba-

karan besar pada 1997-1998 menjadi salah satu episode terparah dalam sejarah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia serta menimbulkan dampak kabut asap lintas negara di Asia Tenggara.

Pada tingkat internasional, persoalan kabut asap akibat kebakaran lahan di kawasan Asia Tenggara turut mendorong kerja sama regional. ASEAN mengadopsi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution pada 2002 sebagai kerangka kerja sama untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran asap lintas batas.

Selain Kalimantan Barat, lima provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla nasional adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Riau. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat respons daerah, sementara efektivitasnya bergantung pada penggunaan anggaran yang tepat, koordinasi lintas instansi, dan langkah pencegahan kebakaran. (*)

dari Neoliberal hingga Populis Agraris Budiman Ungkap Tiga Tantangan Pemikiran bagi Agenda Pembangunan Prabowo



Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan tiga golongan yang mempunyai pandangan bertentangan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Laporan: Radit

J A K A R T A , BP-Kepala Badan Percepatan Penguatan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menyoroti tiga kelompok pemikiran yang menurut penilaiannya berseberangan dengan arah pembangunan Presiden Prabowo Subianto. Ketiga kelompok tersebut adalah kaum neoliberal, sosial liberal, dan populis agraris, yang dikaitkannya dengan perdebatan mengenai kemandirian nasional, peran negara, serta modernisasi petani dan nelayan.

Pernyataan itu disampaikan Budiman dalam Dialog Nasional Refleksi Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo Subianto di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia menguraikan karakteristik ketiga kelompok tersebut berdasarkan pandangannya terhadap agenda kemajuan Indonesia.

"Kaum neoliberalis yang antikemandirian bangsa, kaum sosial liberal yang antikehadiran negara, dan kaum populis agraris yang antikemajuan. Tiga kelompok ini," kata Budiman.

Menurut dia, kelompok neoliberal cenderung tidak mendukung upaya Indonesia membangun kemandirian industri dan teknologi. Budiman mencontohkan pengembangan cip, model kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta mobil nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan produksi dalam negeri.

Ia juga menyoroti kelompok sosial liberal yang, menurut penilaiannya, mence-

maskan besarnya peran negara dalam kehidupan masyarakat. Kekhawatiran tersebut, kata Budiman, berkaitan dengan pengalaman sejarah pemerintahan Orde Baru yang kerap menjadi rujukan dalam perdebatan tentang kekuasaan negara dan risiko otoritarianisme.

"Mereka trauma dengan kehadiran negara, nanti otoriter. Disamakan dengan Orde Baru," ujarnya.

Adapun kelompok populis agraris dinilai Budiman masih mempertahankan romantisme terhadap kehidupan masyarakat kecil. Ia mengkritik pandangan yang seolah-olah menempatkan petani hanya sebagai pekerja tradisional dan nelayan sebatas pelaku usaha berskala sederhana, tanpa memberikan ruang bagi penguasaan teknologi maupun keterampilan manajemen.

"Petani itu enggak boleh ngerti akuntansi, ngertinya macul saja," kata Budiman, menggamarkan pandangan yang dikritiknya.

Budiman berpandangan bahwa petani yang memahami pembukuan dan nelayan yang mengoperasikan kapal modern tetap merupakan bagian dari masyarakat kecil. Penguasaan keterampilan tersebut, menurut dia, justru dapat memperkuat produktivitas dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Perdebatan mengenai kemandirian ekonomi dan peran negara memiliki akar panjang dalam sejarah Indonesia. Pada masa Presiden

Soekarno, gagasan berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri menjadi salah satu prinsip politik dan ekonomi nasional. Pada masa berikutnya, pemerintahan Orde Baru mengembangkan industrialisasi dan pembangunan ekonomi dengan keterlibatan negara yang kuat, sekaligus meninggalkan catatan historis mengenai pembatasan kebebasan politik.

Dalam konteks internasional, perdebatan tentang neoliberalisme menguat sejak akhir abad ke-20, seiring meluasnya kebijakan liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan deregulasi di berbagai negara. Sementara itu, modernisasi pertanian di banyak negara berkembang juga memperlihatkan pentingnya teknologi, akses pembiayaan, pengelolaan usaha, dan infrastruktur dalam meningkatkan produktivitas petani serta nelayan.

Meski demikian, pernyataan Budiman tersebut merupakan penilaian politik dan ideologis yang belum dapat dianggap sebagai kesimpulan ilmiah mengenai ketiga kelompok itu. Tidak ada nama tokoh atau organisasi tertentu yang dirinci sebagai representasi masing-masing golongan dalam pernyataan tersebut. Karena itu, klaim bahwa kelompok neoliberal, sosial liberal, dan populis agraris secara umum berseberangan dengan agenda Prabowo perlu ditempatkan sebagai pandangan narasumber yang masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut. (*)

Kemarau Ekstrem Kepung 14 Daerah, Pemprov Sultra Perketat Pengawasan Karhutla



Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperketat pengawasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memperkuat koordinasi penanganan kekeringan setelah 14 daerah di provinsi tersebut mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi ini diperparah fenomena El Niño yang diprakirakan masih memengaruhi cuaca hingga awal 2027.

Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 20 Oktober 2026, daerah yang mengalami hari tanpa hujan (HTH) kategori ekstrem panjang meliputi Buton, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Kota Baubau, dan Kota Kendari. Sementara itu, daerah lainnya mencatat HTH kategori pendek selama 6-10 hari.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Sultra menggelar rapat koordinasi di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra, Kamis (22/10/2026). Rapat dipimpin Kepala Pelaksana BPBD Sultra La Ode Saifuddin, dengan melibatkan Asisten Administrasi Umum Setda Sultra Rony Yakob, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, TNI, Polri, serta instansi terkait.

Rony Yakob menjelaskan, rapat tersebut menindaklanjuti arahan Gubernur Sultra Andi Sumangeruka untuk menyatukan langkah lintas sektor dalam mengantisipasi dampak kemarau panjang. Menurut dia, keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda, serta instansi teknis menjadi kunci menghadapi potensi bencana yang meningkat akibat kondisi cuaca berkepanjangan.

“Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta instansi terkait diperlukan untuk mengantisipasi kemarau panjang dan mempersiapkan langkah penanganan secara bersama,” kata Rony.

Kepala Pelaksana BPBD Sultra La Ode Saifuddin meminta pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan instansi teknis meningkatkan pemantauan lapangan. Bombana dan Kolaka Timur menjadi wilayah yang masih mendapat perhatian dalam pengawasan karhutla. Penelusuran penyebab kebakaran juga perlu dilakukan, termasuk mengidentifikasi pihak yang diduga sengaja melakukan pembakaran apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Saifuddin menegaskan, perkembangan titik panas (hotspot) harus dilaporkan setiap hari kepada Gubernur Sultra. Pertukaran informasi antarlembaga diperlukan agar indikasi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah pencegahan maupun penanganan terpadu.

Dalam pemaparan

BMKG, prakirawan Bismar Rahmat Adi menyampaikan bahwa fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat masih memengaruhi kondisi cuaca Sultra. Pembaruan data awal Oktober 2026 menunjukkan fenomena tersebut diprediksi bertahan hingga awal 2027 dan berpotensi menekan curah hujan di wilayah tersebut.

BMKG memperkirakan curah hujan di seluruh Sultra masih berada pada kategori rendah hingga akhir Oktober 2026, dengan intensitas maksimal 50 milimeter per dasarian atau periode sepuluh hari. Curah hujan diprakirakan mulai meningkat bertahap pada November, terutama di wilayah utara, meskipun secara umum masih berada pada kategori rendah hingga menengah.

Sebagian besar wilayah Sultra diprediksi memasuki musim hujan pada pertengahan hingga akhir Desember 2026. Namun, beberapa wilayah di Kabupaten Bombana diperkirakan baru memasuki musim hujan pada awal Januari 2027. Potensi curah hujan tinggi di sejumlah wilayah selatan diprakirakan mulai muncul pada Desember.

Pengalaman nasional menunjukkan bahwa kemarau berkepanjangan dapat meningkatkan risiko bencana dengan dampak luas. Data historis BMKG mencatat kekeringan meteorologis terluas dan terparah dalam periode 2011-2020 terjadi pada 2015 dan 2019, ketika dampaknya menjangkau lebih dari 50 pers-

en wilayah Indonesia. Pada 2015, Indonesia juga menghadapi karhutla besar yang bertepatan dengan El Nino dengan luas kebakaran sekitar 2,7 juta hektare menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikutip pemerintah.

Dalam konteks internasional, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mencatat El Nino 2015-2016 sebagai salah satu peristiwa terkuat dalam catatan modern, dibandingkan dengan kejadian 1997-1998 dan 1982-1983. Fenomena tersebut memengaruhi pola iklim global, termasuk memperburuk kondisi kering di sejumlah kawasan. Pengalaman itu memperkuat pentingnya sistem peringatan dini, pertukaran informasi cuaca, dan kesiapan penanggulangan bencana.

Selain memantau kekeringan, BMKG terus mengawasi titik panas dan sebaran asap melalui citra satelit. Bismar menjelaskan bahwa kumpulan indikator berwarna kuning dan merah dapat menunjukkan peluang keberadaan titik panas, tetapi tidak otomatis membuktikan telah terjadi kebakaran. Angin timuran yang masih dominan juga berpotensi membawa asap dari wilayah timur Indonesia, termasuk Papua dan Maluku, menuju Sultra. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat pemantauan dan koordinasi agar risiko karhutla serta dampak asap dapat diantisipasi lebih dini. (*)

Siska Karina Perkuat Akses Keuangan UMKM, Kendari Bidik Ekonomi Inklusif



Laporan: Mashuri

KENDARI, BGP- Pemerintah Kota Kendari memperkuat komitmen memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan literasi keuangan, serta mengembangkan ekonomi digital untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta International Expo (JIE expo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Forum nasional yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu mengangkat tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Pertemuan tersebut menjadi wadah koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan untuk memperluas layanan keuangan yang inklusif.

Siska mengatakan, perluasan akses keuangan harus membuka kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga. Kelompok yang menjadi perhatian meliputi pelaku UMKM, perempuan pengusaha, generasi muda, serta masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembiayaan formal.

“Perluasan akses keuangan harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Kendari, kami ingin memastikan bahwa pelaku UMKM, perempuan pelaku usaha, generasi muda, serta masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses pembiayaan dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk

mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga,” ujar Siska.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengapresiasi pembentukan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia sejak akhir 2024. Presiden menekankan bahwa kebijakan keuangan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan keluarga.

Presiden juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur melalui pertumbuhan makro. Hasil pembangunan harus dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk petani, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi nasional.

Rakornas tersebut turut ditandai dengan peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) oleh Presiden Prabowo, sebagaimana disampaikan dalam materi kegiatan. Agenda ini menyoroti pentingnya memperluas penggunaan layanan keuangan sekaligus memperkuat kesejahteraan finansial masyarakat hingga tingkat keluarga.

Secara historis, pembentukan TPAKD berawal dari pertemuan Presiden RI dengan perwakilan industri jasa keuangan pada 15 Januari 2016. Inisiatif tersebut ditindaklanjuti melalui Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T-900/634/Keuda pada 19 Februari 2016, yang meminta pemerintah daerah membentuk tim percepatan akses keuangan bersama OJK dan pemangku kepentingan terkait.

Tantangan serupa juga menjadi perhatian dunia. Bank Dunia melalui Global Findex 2021 mencatat kepemilikan rekening keuangan penduduk dewasa secara global meningkat dari 51 persen pada 2011 menjadi 76 pers-

en pada 2021. Meski demikian, perluasan akses tetap perlu diikuti pemanfaatan layanan keuangan yang aman dan produktif agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

Bagi Kota Kendari, penguatan TPAKD diarahkan pada peningkatan sinergi dengan OJK, Bank Indonesia, perbankan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta pemanfaatan layanan keuangan digital untuk mendukung produktivitas dan daya saing UMKM lokal.

“Kami berharap hasil Rakornas ini dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di daerah, terutama dalam memperkuat akses pembiayaan usaha produktif, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi Kota Kendari dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” kata Siska.

Ke depan, Pemerintah Kota Kendari melalui TPAKD diharapkan mengoptimalkan koordinasi lintas sektor, memetakan kebutuhan keuangan masyarakat, serta menyusun program yang sesuai dengan kendala pembiayaan sektor produktif. Implementasi program tersebut menjadi faktor penting untuk memastikan perluasan akses keuangan tidak berhenti pada kepemilikan rekening, tetapi berlanjut pada peningkatan kapasitas usaha, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi Wali Kota Kendari dalam Rakornas TPAKD 2026 sekaligus menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap agenda nasional inklusi keuangan. Upaya tersebut diharapkan memperkuat fondasi ekonomi Kota Kendari yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (*)

Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Bupati Buton Alvin Akawijaya Dorong Pemerataan Akses Keuangan bagi UMKM, Petani, dan Nelayan



Pewarta: La Harman

JAKARTA, BP- Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Forum yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Buton untuk memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Rakornas bertema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan, dan pemangku kepentingan sektor keuangan. Fokusnya ialah memperkuat layanan keuangan yang inklusif agar manfaatnya menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.

Alvin mengatakan, perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan yang membutuhkan dukungan permodalan untuk mengem-

bangkan usaha. “Perluasan akses keuangan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami ingin masyarakat Buton, terutama pelaku UMKM, petani, dan nelayan, memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses layanan keuangan formal yang dapat mendukung usaha dan meningkatkan pendapatan mereka,” ujar Alvin.

Menurut dia, kemudahan memperoleh layanan perbankan dan pembiayaan harus disertai peningkatan literasi keuangan. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan mampu memilih produk keuangan secara tepat, mengelola risiko, serta menggunakan pembiayaan untuk kegiatan produktif.

Dalam laporan kepada Presiden, Ketua Dewan Komisiner OJK Friderica Widayari Dewi menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki 552 TPAKD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pada 2026, tingkat literasi keuangan nasional tercatat 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen.

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh daerah pada akhir 2024. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja

kelembagaan yang perlu ditindaklanjuti melalui program nyata agar layanan keuangan semakin mudah dijangkau masyarakat.

Prabowo juga menekankan pentingnya memperluas akses keuangan bagi beragam kelompok, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, dan pedagang hingga santri. Perluasan tersebut diharapkan tidak berhenti pada kepemilikan rekening, tetapi juga membuka peluang masyarakat memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Secara historis, penguatan inklusi keuangan di Indonesia telah menjadi agenda nasional selama lebih dari satu dekade. Pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. Kebijakan itu kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang menekankan koordinasi lintas sektor untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Di tingkat internasional, inklusi keuangan juga menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan Perserika-

tan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Akses terhadap layanan keuangan dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Bagi Kabupaten Buton, agenda tersebut berkaitan dengan kebutuhan memperkuat ekonomi lokal melalui pembiayaan usaha produktif. Pemerintah daerah memandang kerja sama dengan pemerintah pusat, OJK, perbankan, dan lembaga jasa keuangan sebagai langkah penting untuk membuka kesempatan pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat.

Melalui partisipasi dalam Rakornas TPAKD 2026, Pemkab Buton berupaya memperkuat program literasi dan inklusi keuangan sesuai kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi daerah. Rakornas tersebut turut dihadiri jajaran pemerintah pusat, pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah dari seluruh Indonesia, perwakilan industri jasa keuangan, serta pemangku kepentingan terkait.(*)

Percepat RDTR, Bupati Buton Alvin Akawijaya Dorong Kepastian Investasi dan Lapangan Kerja



Laporan:La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang, mempermudah perizinan, dan menarik investasi. Komitmen itu ditegaskan Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., melalui penandatanganan pakta integritas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan RDTR Region II di Claro Hotel Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (20/10/2026).

Percepatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyiapkan landasan tata ruang yang lebih terarah bagi pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi. Pemkab Buton berharap kepastian tata ruang dapat mendorong masuknya investasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelum menghadiri rapat koordinasi di Makassar, Pemkab Buton telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) I penyusunan materi teknis dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR pada 13â€14 Oktober 2026. Pembahasan selama dua hari itu mencakup wilayah perencanaan Kecamatan Wolowa, Siotapina, Kapontori, dan Wabula. Kegiatan dipusatkan di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Pasarwajo.

Bupati Alvin mengatakan, dokumen RDTR diperlukan agar pemanfaatan ruang dan arah pembangunan daerah memiliki perencanaan yang jelas. Kepastian tersebut juga menjadi pertimbangan penting bagi pelaku usaha yang hendak mengembangkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Buton.

“Penyusunan RDTR ini penting agar pemanfaatan ruang dan arah pembangunan di Kabupaten Buton lebih terencana. Kita ingin potensi daerah bisa dikembangkan dengan baik, sekaligus mem-

berikan kepastian bagi investor yang ingin beresaha di Buton,” ujar Alvin.

Menurut dia, penyelesaian dokumen tata ruang perlu diikuti penetapan regulasi secara tepat waktu. Dengan demikian, perencanaan pembangunan tidak berhenti pada dokumen teknis, tetapi dapat mendukung kegiatan usaha dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Harapannya, ketika tata ruang sudah jelas dan proses perizinan semakin mudah, investasi dapat tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan perekonomian masyarakat Buton ikut bergerak,” katanya.

Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta dipimpin Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. Forum ini melibatkan kepala daerah dari Region II yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua untuk menyelaraskan langkah percepatan penyusunan RDTR.

Pada tahun anggaran 2026, Direktorat Jenderal Tata Ruang memberikan bantuan teknis penyusunan RDTR kepada pemerintah daerah melalui dukungan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Program tersebut diarahkan untuk mendukung penyelesaian dokumen tata ruang sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat kepastian pemanfaatan ruang dan iklim investasi.

Agenda rakor meliputi pemaparan gambaran umum penyusunan RDTR 2026 oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang, arahan strategis Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, serta pembahasan sinergi lintas sektor. Sejumlah instansi yang terlibat antara lain Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Dalam Negeri, Kemen-

terian Lingkungan Hidup/BPLH, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Penandatanganan pakta integritas menjadi penegasan komitmen para bupati dan wali kota bersama Direktur Jenderal Tata Ruang untuk menyelesaikan RDTR secara transparan, akuntabel, efektif, dan tepat waktu. Komitmen itu mencakup penyusunan dokumen, penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), hingga integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Pemkab Buton menyatakan siap mendukung proses tersebut melalui penyediaan data dan informasi, pemenuhan kebutuhan teknis, fasilitasi kegiatan di daerah, serta percepatan pembahasan dan penyepakatan substansi RDTR sesuai kewenangan. Tahapan itu menjadi penting agar dokumen yang disusun dapat diterapkan dan digunakan dalam proses perizinan serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Secara historis, penguatan tata ruang Indonesia berkembang melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kemudian diperbarui dalam kerangka reformasi perizinan dan investasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahan dan pengaturan lanjutannya. Di tingkat internasional, agenda pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan, juga menekankan pentingnya perencanaan wilayah yang inklusif dan terarah. Dalam konteks Kabupaten Buton, percepatan RDTR diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk menyelaraskan pembangunan, kepastian usaha, dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.(*)

Kemenkes Kirim 500 Ribu Masker per Provinsi, Rumah Oksigen Diperkuat Hadapi Karhutla



Peliput: Warman

JAKARTA, BP- Kementerian Kesehatan memperkuat penanganan darurat kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan dengan menginstruksikan pengiriman tambahan 500 ribu masker untuk setiap provinsi terdampak. Pemerintah juga menyiapkan konsentrator oksigen, pasokan obat-obatan, serta perluasan layanan rumah oksigen di puskesmas untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap. Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan karhutla bidang kesehatan di Jakarta, Sabtu (17/10/2026). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta distribusi logistik medis dipercepat melalui koordinasi dengan dinas kesehatan setempat, dengan jumlah obat-obatan dan peralatan disesuaikan berdasarkan kebutuhan mas-

ing-masing daerah. “Seluruh Puskesmas di wilayah terdampak wajib membuka layanan rumah oksigen dan menjamin ketersediaan obat-obatan, khususnya untuk penanganan ISPA dan diare,” tegas Budi dalam keterangan yang disampaikan Kemenkes. Tujuh provinsi menjadi sasaran penanganan, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Rapat koordinasi melibatkan kepala dinas kesehatan tingkat provinsi serta kabupaten/kota, kepala puskesmas, dan kepala unit pelaksana teknis Kemenkes. Pertemuan harian tersebut bertujuan memetakan kondisi masyarakat sekaligus memastikan bantuan tiba tepat waktu dan tepat sasaran. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono menekankan perlunya

respons terpadu antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, kecepatan pemenuhan kebutuhan medis dan logistik menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko kesehatan masyarakat yang terpapar asap karhutla. “Pemenuhan kebutuhan medis dan logistik harus dieksekusi sesegera mungkin. Kita semua harus bergerak bersama mengambil langkah cepat dan sigap untuk mengatasi ancaman kesehatan yang dihadapi masyarakat terdampak Karhutla,” ujar Sugiono. Selain menyediakan masker dan peralatan oksigen, Kemenkes bersama pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan tenaga kesehatan menyiapkan layanan Posyandu dari rumah ke rumah. Program tersebut diprioritaskan bagi anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia yang berisiko mengalami gangguan kesehatan ketika paparan asap memburuk dan aktivitas di luar rumah

dibatasi.

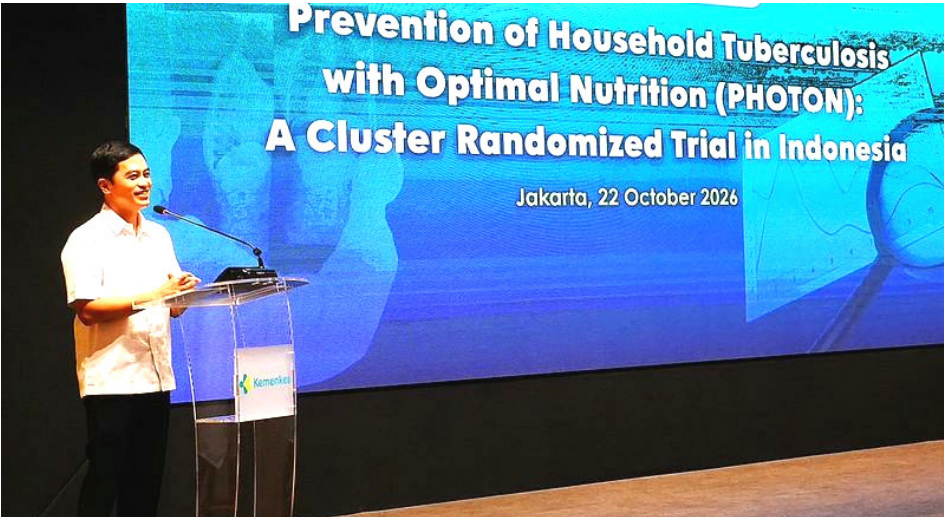
Pemerintah juga meminta tenaga kesehatan memberikan pertolongan kepada petugas pemadam kebakaran yang membutuhkan layanan medis selama bertugas. Untuk mendukung penanganan di lapangan, Kemenkes kembali menerjunkan tim Pusat Krisis Kesehatan guna memantau distribusi bantuan, operasional rumah oksigen, dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

Ancaman kesehatan akibat karhutla bukan persoalan baru di Indonesia. Data historis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, kebakaran hutan dan lahan pada 2015 menghancurkan sekitar 2,61 juta hektare lahan dan menyebabkan lebih dari 600 ribu orang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kerugian ekonomi saat itu diperkirakan mencapai Rp221 triliun.

Dampak serupa juga menjadi perhatian dunia. Sebuah penelitian global yang menganalisis paparan polusi udara dari kebakaran lanskap selama 2000-2019 memperkirakan 2,18 miliar orang terpapar polusi udara terkait kebakaran dalam tingkat substansial setidaknya satu hari setiap tahun. Rata-rata penduduk dunia mengalami paparan tersebut selama 9,9 hari per tahun, menunjukkan bahwa pencemaran akibat kebakaran merupakan persoalan kesehatan lintas negara.

Pengalaman tersebut mempertegas pentingnya kesiapsiagaan layanan kesehatan ketika karhutla terjadi. Melalui percepatan distribusi bantuan, penguatan puskesmas, dan pemantauan langsung oleh tim krisis kesehatan, pemerintah berupaya memastikan warga di tujuh provinsi terdampak memperoleh perlindungan serta layanan medis sesuai kebutuhan. (*)

Kemenkes dan UI Uji Intervensi Gizi untuk Cegah Penularan TB dalam Keluarga



Laporan: Ardi

JAKARTA, BP- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Universitas Indonesia (UI) memulai uji klinik Prevention of Household Tuberculosis with Optimal Nutrition (PHOTON) untuk menguji efektivitas intervensi gizi dalam mencegah tuberkulosis (TB) pada anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien. Penelitian yang diluncurkan di Jakarta, Kamis (22/10/2026), itu melibatkan 78.400 peserta di Indonesia dan Tanzania.

Uji klinik tersebut menjadi bagian dari upaya mencari pendekatan tambahan untuk menekan penularan TB, terutama di tengah tingginya beban penyakit tersebut di Indonesia. Kemenkes mencatat sekitar satu juta warga Indonesia jatuh sakit akibat TB pada 2024, dengan angka kematian mencapai 136.000 jiwa.

Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2025 yang diterbitkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), diperkirakan 10,7 juta orang di dunia jatuh sakit akibat TB pada 2024 dan 1,23 juta orang meninggal. Indonesia termasuk delapan negara yang secara bersama-sama menyumbang sekitar dua pertiga kasus TB baru dunia. Data ini menunjukkan bahwa penanggulangan TB masih menjadi tantangan kesehatan global.

Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono, mengatakan upaya pengendalian TB membutuhkan strategi yang melampaui pengobatan

konvensional. Ia menyoroti pentingnya pemenuhan gizi sebagai faktor pendukung dalam memperkuat daya tahan tubuh dan mengoptimalkan upaya pencegahan. “Masalah nutrisi inilah yang disorot dalam penelitian PHOTON. Mungkin jawaban yang selama ini kita cari ada di piring makan kita,” ujar Dante.

Menurut dia, cakupan terapi pencegahan TB bagi kontak serumah baru mencapai 19,7 persen dari target 80 persen. Karena itu, penelitian PHOTON diharapkan menghasilkan bukti ilmiah mengenai kemungkinan intervensi gizi menjadi pelengkap program pencegahan medis, terutama bagi keluarga yang memiliki risiko penularan lebih tinggi.

Penelitian ini memiliki landasan historis dari studi RATIONS di India yang dipublikasikan dalam jurnal The Lancet. Studi tersebut melaporkan bahwa dukungan nutrisi kepada pasien TB dan anggota keluarga yang tinggal serumah dapat menurunkan kejadian TB baru pada kontak serumah hingga 48 persen. Temuan itu menjadi salah satu dasar untuk menguji efektivitas pendekatan serupa dalam konteks Indonesia dan Tanzania.

Principal Investigator PHOTON Indonesia dari UI, Prof. Rina Agustina, menjelaskan bahwa penelitian menggunakan metode Randomized Controlled Trial (RCT), yakni peserta dibagi secara acak ke dalam kelompok intervensi. Dari total 78.400 peserta di dua negara, sebanyak 42.260 orang

berada di Indonesia, yang tersebar di Jakarta, Depok, Bogor, dan Lombok.

Peserta akan dibagi ke dalam empat kelompok, yakni penerima plasebo, vitamin D, kombinasi multimikro-nutrien, serta balanced energy-protein atau dukungan energi dan protein seimbang. Intervensi diberikan selama enam bulan, sementara manfaatnya dipantau selama 24 bulan untuk menilai hasil penelitian.

Rina menegaskan, Indonesia tidak sekadar menjadi lokasi penelitian, tetapi juga memegang kepemimpinan ilmiah sejak penyusunan protokol hingga pelaksanaan studi. Pelaksananya dipimpin UI melalui Center for Global Resilience in Health and Nutrition (C-GRHEN), bekerja sama dengan Summit Institute for Development, Siklus Indonesia, dan Oxford University Clinical Research Unit. Penelitian ini mendapat dukungan pendanaan dari Gates Foundation, Wellcome Trust, dan Novo Nordisk Foundation.

Wakil Rektor UI, Prof. Dr. Hamdi Mukluk, menyambut kolaborasi tersebut sebagai langkah untuk memperkuat kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah. Dante menambahkan, keberhasilan penelitian memerlukan keterlibatan pemerintah, akademisi, tenaga klinis, sektor swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat. Seluruh pelaksanaan penelitian, menurut Rina, harus mengutamakan keselamatan, hak, serta kerahasiaan peserta sesuai standar Good Clinical Practice. (*)

PT FAREN GRAFIKA

Harian Pagi

Baubau Post

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetyo
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Mengaku Imam Mahdi, Pria di Bangkalan Dilaporkan atas Dugaan Penipuan Rp1,3 Miliar



Ilustrasi. Figar Fadilah di Bangkalan dilaporkan atas penipuan dan pemerasan berkedok agama, merugikan korban hingga Rp1,3 miliar.

Laporan: Amran

BANGKALAN,” Dugaan penipuan dan pemerasan berkedok agama dengan modus pembayaran top up umur menyeret seorang pria bernama Figar Fadlillah ke ranah hukum di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Belasan orang disebut menjadi korban, dengan kerugian salah satu keluarga mencapai Rp1,3 miliar. Perkara tersebut dilaporkan ke Polres Bangkalan pada 21 Oktober 2026.

Kuasa hukum korban, Jailani M, mengatakan dugaan penipuan itu berawal dari forum pengajian yang dipimpin seseorang bernama Gus Yayak sejak 2015. Selama empat tahun pertama, kegiatan tersebut disebut berisi pengajaran tentang kepatuhan kepada orang tua dan guru. Namun, menurut Jailani, pola pengajaran itu secara bertahap membentuk fanatisme sehingga pengikut tidak terbiasa mempertanyakan ajaran pemimpinnya.

Situasi berubah setelah Gus Yayak meninggal dunia pada 2019. Figar, yang disebut sebagai adik Gus Yayak, kemudian mengarahkan para pengikut untuk menemui ayahnya, Ahmad Zubaidi. Dalam pertemuan tersebut, Zubaidi diduga mengangkat dirinya

sebagai Ratu Adil Alaihis Salam, sedangkan Figar disebut dinobatkan sebagai Imam Mahdi.

Jailani menjelaskan, Zubaidi diduga mengklaim memiliki kemampuan berkomunikasi langsung dengan Tuhan, mengendalikan bumi dan langit, serta membaca amal manusia melalui Lauhulmahfuz. Para pengikut juga disebut dilarang mempertanyakan ajaran kelompok, tidak diperbolehkan membawa telepon seluler ketika menghadap, dan diwajibkan mengenakan pakaian putih.

“Setiap santri yang dinyatakan atau diancam akan berumur pendek diwajibkan membayar sejumlah uang sebesar Rp3 juta dengan Rp5 juta,” kata Jailani, Jumat (23/10/2026).

Menurut kuasa hukum korban, pembayaran itu disebut sebagai biaya perpanjangan umur atau top up umur. Permintaan uang juga diduga dibebankan kepada anggota keluarga korban, mulai dari istri, orang tua, mertua, hingga anak-anak, dengan dalih membayar kafarat atau denda untuk menebus dosa.

Ketika ancaman kematian yang diprediksi Zubaidi tidak terjadi sesuai tenggat yang disebutkan, Figar diduga memberikan penjelasan tambahan agar para pengikut tetap

percaya. Kematian yang dimaksud, menurut penjelasan kepada korban, bukan hanya kematian fisik, melainkan juga hilangnya keimanan. Selain itu, sejumlah pengikut disebut diminta membayar puluhan juta rupiah untuk pengangkatan sebagai Waliyullah.

Jailani menyebutkan kerugian kliennya beserta keluarga mencapai Rp1,3 miliar. Korban lainnya dilaporkan mengalami kerugian Rp174 juta, sementara beberapa orang lain kehilangan uang Rp13 juta hingga Rp30 juta. Angka tersebut merupakan keterangan kuasa hukum korban dan belum dinyatakan sebagai kerugian yang terbukti melalui putusan pengadilan.

“Kalau klien saya ini ada Rp1,3 miliar, ada santrinya Rp174 juta, yang lain itu ada puluhan, Rp30 juta, Rp25 juta, Rp15 juta, ada yang Rp13 juta,” ujar Jailani.

Setelah Zubaidi meninggal dunia pada 2025, para korban disebut mulai menyadari dugaan penipuan tersebut dan memilih menempuh jalur hukum. Laporan terhadap Figar diterima Polres Bangkalan dengan nomor LP/B/248/X/2026/SPKT/POLRES BANGKALAN/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 21 Oktober 2026. Fi-

gar dilaporkan karena Zubaidi, yang disebut sebagai Ratu Adil oleh kelompok tersebut, telah meninggal dunia.

Kasus di Bangkalan ini mengingatkan pada sejumlah perkara serupa di Indonesia. Pada 2016, misalnya, kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Jawa Timur menjadi sorotan nasional setelah muncul dugaan penipuan berkedok kemampuan menggandakan uang. Pada 2023, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengungkap perkara penipuan dengan modus seorang guru spiritual yang menjanjikan penggandaan uang dan menyebabkan kerugian korban hingga Rp1,45 miliar.

Fenomena penyalahgunaan kepercayaan keagamaan untuk memperoleh keuntungan juga tercatat di luar negeri. Di Amerika Serikat, pendeta Jim Bakker dinyatakan bersalah dalam perkara penipuan yang berkaitan dengan penjualan kemitraan bisnis melalui organisasi keagamaannya. Kasus tersebut menunjukkan bahwa posisi spiritual dan kepercayaan pengikut dapat disalahgunakan untuk kepentingan finansial. Meski demikian, setiap perkara memiliki fakta dan proses hukum tersendiri. (*)

Polda Metro Panggil Dandhy Laksono 27 Oktober, Kasus Film Pesta Babi Diselidiki



Pembuat film dokumenter bersama Watchdoc, Dandhy Dwi Laksono

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-Polda Metro Jaya menjadwalkan pemanggilan ulang sutradara dokumenter Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono, pada Selasa (27/10/2026). Pemanggilan tersebut bertujuan meminta klarifikasi atas laporan Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, salah satu narasumber dalam film itu, yang kini masih ditangani pada tahap penyelidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pemanggilan sebelumnya dijadwalkan pada 19 Oktober 2026, tetapi Dandhy tidak hadir. Polisi kemudian menetapkan jadwal baru untuk mendalami laporan yang diterima pada 29 Mei 2026.

“Pemanggilan beberapa hari yang lalu itu untuk dilakukan penundaan. Sehingga akan dilakukan pemanggilan di tanggal 27 Oktober,” kata Budi di kompleks Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2026).

Selain Dandhy, polisi berencana meminta klarifikasi kepada Ketua LBH Merauke berinisial JTW. Berdasarkan laporan yang terdaftar dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 juncto Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Budi menegaskan, status perkara masih dalam penyelidikan. Polisi akan mempertimbangkan peningkatan ke tahap

penyidikan apabila ditemukan bukti yang cukup, sedangkan penyelidikan dapat dihentikan jika tidak ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana. Kepolisian juga menyatakan mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam penanganan perkara tersebut.

Di sisi lain, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), kuasa hukum Dandhy, menyatakan kliennya belum dapat memenuhi undangan klarifikasi. Dalam surat tanggapan yang diunggah melalui akun Instagram @dandhy_laksono pada Jumat (23/10/2026), tim tersebut mempersoalkan dasar hukum undangan yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Undangan itu tercantum dalam surat Nomor B/29953/X/RES.1.24/2026/Ditreskrimum tertanggal 9 Oktober 2026. Dandhy diminta hadir pada 19 Oktober pukul 10.00 WIB di Unit V Subdirektorat Keamanan Negara. Namun, menurut TAUD, undangan klarifikasi tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan.

Tim kuasa hukum juga menilai surat tersebut tidak menjelaskan status hukum Dandhy, baik sebagai saksi maupun tersangka. Atas dasar itu, mereka berpendapat belum terdapat kewajiban bagi kliennya untuk memenuhi undangan tersebut sebelum kejelasan hukum diberikan.

Anggota TAUD, Fadhil Alfathan, me-

mintakan kepolisian meninjau kembali laporan tersebut. Ia menilai persoalan yang muncul berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan hak masyarakat memperoleh informasi. Menurut dia, jika terdapat sengketa terkait karya jurnalistik, mekanisme di luar proses pidana, termasuk kemungkinan penilaian melalui Dewan Pers, perlu dipertimbangkan.

“Kami mendorong Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik yang menangani perkara untuk meninjau lebih jauh gitu ya laporan ini,” ujar Fadhil, Jumat (23/10/2026).

Secara historis, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada 17 Oktober 2022. Regulasi tersebut mengatur larangan memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi secara melawan hukum. Di tingkat internasional, Uni Eropa telah menerapkan General Data Protection Regulation (GDPR) sejak 25 Mei 2018, yang menjadi salah satu tonggak penting penguatan perlindungan data pribadi. Kedua kerangka hukum tersebut menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap hak individu atas data pribadi di era digital.

Perkara ini mempertemukan dua kepentingan yang perlu dinilai secara cermat, yakni perlindungan data pribadi dan kebebasan berekspresi. Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya unsur pidana tetap bergantung pada fakta dan bukti yang diperiksa melalui proses hukum. Hingga 23 Oktober 2026, Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan dan belum menyatakan perkara tersebut naik ke tahap penyidikan. (*)

Kepala SMPN Satap 20 Buteng Janji Segera Ganti Kusen Usai Temuan Disdikbud Yang Hanya Dicat, Revitalisasi Rp575 Juta Disorot

yarakat mengenai kualitas pekerjaan. Dari pemantauan tersebut, ia menemukan sejumlah bagian bangunan yang diduga hanya dicat ulang, meskipun dalam perencanaan seharusnya menggunakan material baru.

“Dari pengakuan pekerja, ada beberapa item yang pengerjaannya hanya dilakukan dengan pengecatan kembali, padahal semestinya diganti baru,” kata Amaluddin, Rabu (21/10/2026).

Kepala SMPN Satap 20 Buteng, Ridwan Ardi, mengakui kusen lama dipertahankan karena kondisinya dinilai masih layak. Namun, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian volume pekerjaan apabila tidak disertai perubahan perencanaan melalui mekanisme yang berlaku. Ridwan menyatakan telah berkoordinasi dengan pengawas dan memesan kusen baru setelah diarahkan agar penggantian dilakukan sesuai perencanaan.

“Saya menilai kusen itu masih bagus dan layak, makanya tidak diganti, melainkan didempul lalu dicat ulang,” ujar Ridwan, Kamis (22/10/2026).

Amaluddin mengatakan telah menemui Ridwan dan meminta penggantian kusen segera diselesaikan. Kepala sekolah meminta waktu dua pekan untuk memasang material baru. Disdikbud berencana memeriksa hasilnya pada pekan pertama November 2026, termasuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan RAB, volume, dan ketentuan pelaksanaan program.

Dalam sejarah pembangunan pendidikan Indonesia, penyediaan dan perbaikan gedung sekolah telah menjadi agenda pemerintah sejak program Instruksi Presiden (Inpres) pembangunan sekolah dasar dimulai pada 1973. Inpres Nomor 6 Tahun 1974 kemudian mengatur tahap kedua program tersebut, termasuk rencana pembangunan 6.000 sekolah dasar pada tahun anggaran 1974/1975.

Sejarah itu memperlihatkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan perlu disertai perhatian terhadap mutu dan pemeliharaan bangunan.

Dalam konteks internasional, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015 menempatkan pendidikan berkualitas sebagai tujuan keempat. Target 4.a secara khusus mendorong penyediaan fasilitas pendidikan yang aman, inklusif, dan efektif. Prinsip tersebut mempertegas bahwa keberhasilan revitalisasi tidak cukup diukur dari tersedianya anggaran atau selesainya pekerjaan, tetapi juga dari kesesuaian spesifikasi dan kelayakan fasilitas yang digunakan siswa. (*)

Konektivitas Siompu-Kadatua Diperkuat Sebagai Respon Bupati Buton Selatan H Muh Adios Jawab Keluhan Warga, KMP Prima Satu Tunggu Persiapan Teknis

terhadap keluhan masyarakat mengenai terbatasnya layanan penyeberangan. Dalam kondisi tertentu, penumpang bahkan harus berlama-lama di pelabuhan, sementara kendaraan menunggu hingga tersedia ruang angkut pada keberangkatan berikutnya.

“Harus ada tambahan kapal untuk melayani Siompu dan Kadatua. Dengan adanya penambahan kapal, diharapkan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Buton Selatan,” kata Ilmayang saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/10/2026).

Meski demikian, KMP Prima Satu belum dapat langsung beroperasi karena masih memerlukan persiapan teknis dan administratif bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Tahapan tersebut meliputi pembahasan subsidi, survei lintasan, dan pemeriksaan kesiapan fasilitas pelabuhan, termasuk pembersihan kolam labuh di Pelabuhan Bandar Batauga agar kapal dapat bersandar dengan aman.

Menurut Ilmayang, pembagian tugas dua kapal yang akan melayani rute penyeberangan antarpulau masih dimatangkan bersama instansi terkait. Kapal dengan ukuran GT lebih besar direncanakan melayani rute Siompu karena permintaan jasa penyeberangan di wilayah tersebut relatif lebih tinggi. Pemerintah daerah berharap pengaturan ini dapat mengurangi antrean penumpang dan kendaraan sekaligus meningkatkan kepastian layanan.

Keterbatasan penyeberangan juga berpotensi mengganggu pasokan barang dan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di Siompu dan Kadatua, yang pada akhirnya dapat memengaruhi inflasi daerah. Dalam konteks nasional, konektivitas antarpulau merupakan bagian penting dari pembangunan negara kepulauan. Indonesia mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yang memperkuat landasan hukum Indonesia sebagai negara kepulauan.

Di sisi pendapatan daerah, Ilmayang menyebutkan, kontribusi sektor penyeberangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari sekitar Rp50 juta per tahun menjadi Rp125 juta, kemudian mencapai Rp150 juta pada 2026. Pemerintah daerah menargetkan penerimaan tersebut naik menjadi Rp175 juta pada tahun berikutnya. Namun, angka Rp125 juta perlu dikonfirmasi kembali untuk memastikan kesesuaian data penerimaan yang disampaikan.

Dishub Buton Selatan juga merencanakan penambahan satu armada kapal pada tahun mendatang untuk melayani rute menuju Pulau Batuat. Ilmayang berharap penambahan armada secara bertahap dapat memperluas akses transportasi laut, memperlancar pergerakan masyarakat dan barang, serta mengurangi hambatan mobilitas antarpulau. “Harapannya, dengan adanya tambahan kapal KMP Prima Satu, konektivitas antarwilayah di Buton Selatan, khususnya Pulau Siompu dan Kadatua, semakin lancar. Tidak ada lagi batas waktu dan tidak ada sekat lagi,” ujarnya. (*)

Buton Selatan Gelar Pangan Murah, Beras SPHP 5 Kilogram Dijual Rp57 Ribu

Pelaksanaan GPM juga mendapat dukungan Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., melalui Asisten I Sekretariat Daerah, Kaimuddin, M.H. Kegiatan tersebut melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Yonif TP 871/La Maindo, Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan pengendalian inflasi.

Kaimuddin menjelaskan, pemerintah daerah berperan mempertemukan produsen, distributor, dan pelaku usaha agar masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau. Menurut dia, harga yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut dapat ditekan melalui kerja sama dengan mitra, termasuk Perum Bulog, serta dukungan subsidi pemerintah.

“Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dengan mempertemukan produsen, distributor, dan pelaku usaha pangan agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga

yang terjangkau,” ujar Kaimuddin.

Secara historis, persoalan keterjangkauan pangan telah menjadi perhatian nasional dan internasional. Di Indonesia, pemerintah mengembangkan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan, termasuk penyaluran beras SPHP melalui Perum Bulog. Pada tingkat global, Hari Pangan Sedunia diperingati setiap 16 Oktober untuk memperingati berdirinya Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) pada 1945. Peringatan tersebut mendorong perhatian terhadap ketahanan pangan, akses terhadap makanan, dan upaya mengatasi kelaparan.

Melalui GPM, Pemkab Buton Selatan berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok dengan biaya lebih ringan, sementara ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di daerah tetap terjaga. Efektivitas program ini perlu ditopang pemantauan harga dan distribusi secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas. (*)

Bidik Prestasi 2027, SMA Negeri 1 Baubau Matangkan Persiapan Siswa Hadapi OSN, O2SN dan FLS3N 2027

mat (23/10).

Untuk menunjang persiapan, sekolah berkomitmen menyediakan kebutuhan belajar dan latihan sesuai cabang yang diikuti. Peserta OSN akan didukung dengan buku-buku olimpiade dan bahan pembelajaran, sedangkan peserta FLS3N memperoleh dukungan perlengkapan untuk bidang seni, termasuk seni kriya dan desain poster. Pembinaan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa di bidang olahraga melalui O2SN.

“Apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dalam mengikuti lomba akan dipenuhi oleh sekolah, termasuk buku olimpiade dan

bahan-bahan yang dibutuhkan untuk lomba seni,” ujar Samsuriati.

Persiapan lebih awal tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah meningkatkan daya saing peserta didik di bidang akademik, olahraga, seni, dan sastra. Dengan pembinaan terarah serta dukungan fasilitas, sekolah berharap siswa memiliki waktu yang memadai untuk mengembangkan kemampuan sebelum kompetisi tingkat kabupaten/kota pada Mei 2027.

Optimisme itu turut ditopang prestasi sebelumnya. Dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kota Baubau dan 25 tahun Baubau sebagai daerah otonom, SMA Negeri 1 Baubau meraih juara pertama lomba nyanyi solo lagu daerah dan juara kedua cabang bulu tangkis. Capaian tersebut menjadi modal untuk

mendorong prestasi siswa pada ajang berikutnya.

Secara nasional, OSN menjadi salah satu wahana pengembangan talenta sains peserta didik, sedangkan O2SN mendorong pembinaan prestasi olahraga dan FLS3N memberi ruang bagi kreativitas seni serta sastra. Dalam konteks internasional, pengembangan kemampuan sains, olahraga, dan seni sejak usia sekolah juga sejalan dengan pendekatan pendidikan holistik yang menekankan penguasaan pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan karakter. Karena itu, persiapan SMA Negeri 1 Baubau menjadi langkah awal untuk mengembangkan potensi siswa secara lebih terencana. (*)

Pesta Adat Ma’acia Digelar, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Serukan Pelestarian Budaya Lokal

digelar pada 17-24 Oktober 2026 di Desa Burangasi, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya menjaga keberlangsungan tradisi sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat setempat.

Muhammad Adios menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut dia, pesta adat dan festival budaya tidak hanya menjadi ruang perayaan, tetapi juga mencerminkan rasa syukur masyarakat serta kepedulian terhadap warisan leluhur.

“Saya mendukung penuh Pesta Adat Ma’acia dan Festival Budaya Burangasi 2026 ini. Ini merupakan wujud kelestarian tradisi budaya serta rasa syukur masyarakat kita,” ujar Adios melalui salah satu akun media sosial Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Bupati juga mengingatkan masyarakat agar ber-

partisipasi dengan menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar pelaksanaan pesta adat dan festival berjalan baik serta nilai-nilai budaya yang diwariskan antargenerasi tetap terpelihara.

“Mari bersama kita sukseskan acara ini, jaga ketertiban, dan terus lestarikan warisan budaya Buton Selatan,” katanya.

Pelestarian tradisi lokal memiliki arti penting di tengah perubahan sosial dan perkembangan pariwisata. Secara nasional, Indonesia memiliki landasan perlindungan kebudayaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengatur upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kerangka tersebut menempatkan tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, dan berbagai ekspresi budaya sebagai bagian penting dari kekayaan

bangsa.

Dalam konteks internasional, UNESCO mengadopsi Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda pada 2003. Konvensi tersebut menegaskan pentingnya menjaga tradisi, praktik sosial, ritual, dan pengetahuan yang diwariskan antargenerasi. Prinsip ini relevan dengan penyelenggaraan Pesta Adat Ma’acia dan Festival Budaya Burangasi sebagai ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memperkenalkan tradisi lokal.

Melalui dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, Festival Budaya Burangasi diharapkan dapat memperkuat identitas budaya Buton Selatan sekaligus memperluas pengenalan tradisi daerah kepada pengunjung dari luar wilayah. Namun, keberlanjutan kegiatan budaya tetap bergantung pada keterlibatan masyarakat setempat dan pewarisan nilai-nilai adat kepada generasi muda. (*)

Baubau Dorong Diversifikasi dan Penghematan Pangan di Hari Pangan Sedunia 2026, Sekda La Ode Darussalam Dorong Warga Konsumsi Jagung dan Ubi untuk Perkuat Ketahanan Pangan



Hari Pangan Sedunia 2026, Sekda Baubau La Ode Darussala Ajak Warga Kurangi Ketergantungan Beras dan Cegah Pemborosan Panga

KORAN BAUBAU POST
www.baubaupost.com

Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau mendorong masyarakat mengurangi ketergantungan pada beras, mengoptimalkan konsumsi pangan lokal, dan menekan pemborosan makanan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Ajakan yang disampaikan Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darussalam, dalam rangkaian Hari Pangan Sedunia 2026, Kamis (22/10/2026), itu menekankan pentingnya perubahan pola konsumsi yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Mewakili Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., La Ode Darussalam menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak cukup dibangun melalui peningkatan produksi pertanian. Kesadaran masyarakat dalam memilih, mengolah, menyimpan, dan mengonsumsi makanan juga menjadi faktor penting untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi keluarga.

“Kita memiliki beragam sumber pangan lokal. Ada jagung, ubi kayu, dan berbagai makanan tradisional yang bisa kita manfaatkan. Karena itu, mari kita biasakan keluarga, termasuk anak-anak, untuk mengenal dan mengonsumsi pangan yang beragam,” ujarnya.

Dorongan diversifikasi pangan tersebut memiliki relevansi dengan perjalanan ke-

bijakan pangan Indonesia. Sejak dekade 1960-an, pemerintah telah mengembangkan upaya penganekaragaman konsumsi untuk mengurangi dominasi beras. Namun, beras tetap menjadi makanan pokok utama, sementara sejumlah pangan lokal, seperti jagung dan umbi-umbian, belum sepenuhnya menjadi pilihan utama masyarakat. Kajian Kementerian Pertanian juga mencatat tantangan tersebut dalam perkembangan kebijakan diversifikasi pangan nasional.

Pada 15 Agustus 2024, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Kebijakan ini menjadi landasan penting untuk mendorong pemanfaatan potensi pangan daerah, termasuk berbagai sumber karbohidrat selain beras. Bagi Baubau dan wilayah Sulawesi Tenggara, pengembangan konsumsi jagung, ubi kayu, serta pangan tradisional dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal.

Selain persoalan keragaman konsumsi, Darussalam menyoroti pemborosan makanan yang dapat dicegah melalui kebiasaan sederhana di lingkungan keluarga. Ia mengingatkan masyarakat agar mengambil makanan sesuai kebutuhan sehingga hasil pertanian dan kerja keras petani tidak be-

raakhir sebagai sampah. “Kalau kita mengambil makanan, ambillah secukupnya sesuai kebutuhan. Jangan sampai makanan yang sudah diambil justru terbuang. Kita harus membiasakan diri menghargai setiap makanan,” katanya.

Ia menyarankan empat langkah praktis untuk mengurangi sisa makanan, yakni menyusun menu dan berbelanja sesuai kebutuhan, menyimpan bahan pangan dengan benar, mengolah kembali sisa makanan secara aman selama masih layak dikonsumsi, serta membiasakan seluruh anggota keluarga mengambil makanan secukupnya. Langkah tersebut juga perlu disertai edukasi kepada anak-anak agar mereka mengenal beragam sumber pangan sejak dini.

Menurut Darussalam, pengurangan sampah pangan tidak hanya membantu rumah tangga menggunakan anggaran secara lebih bijak, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan. Produksi pangan membutuhkan lahan, air, energi, dan tenaga kerja sehingga makanan yang terbuang turut mencerminkan sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Peringatan Hari Pangan Sedunia sendiri memiliki sejarah internasional. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) didirikan pada 16 Oktober 1945, sedangkan Hari Pangan Sedunia ditetapkan pada konferensi FAO 1979 dan mulai diperingati pada 16 Oktober 1981. Peringatan ini menjadi sa-

rana untuk meningkatkan kesadaran global terhadap persoalan kelaparan, kekurangan gizi, dan pentingnya sistem pangan berkelanjutan. Pada 2026, FAO mengusung tema “Innovate today. Nourish tomorrow” atau berinovasi hari ini untuk memberi pangan bagi masa depan.

Dalam konteks daerah, Darussalam menilai ketahanan pangan harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah dan petani. Dukungan terhadap produk pangan lokal, penerapan pola konsumsi yang beragam, dan penghargaan terhadap hasil pertanian perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

Ia pun mengapresiasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta seluruh perangkat daerah terkait atas upaya dan inovasi yang dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan di Kota Baubau. Sinergi dengan TNI, Kejaksaan, Polri, kelompok tani, dan masyarakat diharapkan terus ditingkatkan untuk mengantisipasi kerawanan pangan serta menjaga stabilitas pasokan pangan daerah.

“Ketahanan pangan membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dengan memanfaatkan pangan lokal, mengurangi pemborosan makanan, dan memperkuat kerja sama, kita dapat membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” demikian pesan yang sejalan dengan ajakan pemerintah daerah dalam peringatan Hari Pangan Sedunia 2026. (*)

Diskominfo Baubau dan Balmon Kendari Godok Aturan Penataan Kabel Telekomunikasi, Data Menara Baru 21 Unit, Penataan Infrastruktur Digital Diperkuat



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, menyiapkan regulasi penataan infrastruktur telekomunikasi pasif untuk mengatasi kabel jaringan internet yang semrawut, menyinkronkan data menara, serta mendorong pemerataan kualitas sinyal. Upaya tersebut dibahas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Baubau bersama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II Kendari dalam pertemuan koordinasi penataan infrastruktur telekomunikasi.

Kepala Diskominfo Kota Baubau, H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si., mengatakan pemerintah daerah tengah menyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasif. Regulasi itu diarahkan untuk menciptakan penataan infrastruktur yang lebih tertib, menjaga estetika kota, dan tetap memperhatikan batas kewenangan pemerintah daerah.

Persoalan yang menjadi perhatian ialah bentangan kabel serat optik (fiber optic/FO) milik berbagai penyedia jasa internet (Internet Service Provider/ISP) yang belum tertata rapi di ruang publik. Selain mengganggu wajah kota, keberadaan infrastruktur yang tersebar tanpa pendataan terpadu menyulitkan pemerintah daerah memetakan kebutuhan penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi.

“Kami sedang merancang Perda terkait penyelenggaraan infrastruktur pasif. Langkah ini penting untuk menertibkan tata ruang kota sekaligus merespons keluhan masyarakat mengenai sinyal lemah yang kerap mengemuka saat kunjungan ker-

ja legislatif,” ujar Andi Hamzah.

Persoalan lainnya menyangkut perbedaan data administrasi dan kondisi lapangan. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), jumlah menara telekomunikasi yang tercatat secara administratif baru sekitar 21 unit. Sementara itu, hasil pengamatan lapangan menunjukkan keberadaan menara dan tiang jaringan jauh lebih banyak. Perbedaan tersebut menjadi alasan perlunya pencocokan data antarlembaga.

Kepala Balmon Kendari, Boby Satriyo Suleman, S.H., M.H., mendukung langkah Pemkot Baubau dan menawarkan sejumlah alternatif penataan. Pilihan tersebut meliputi pembangunan saluran utilitas terpadu bawah tanah untuk menempatkan kabel jaringan serta penyediaan menara bersama yang dapat dimanfaatkan sejumlah operator atau ISP. Menurut dia, penerapan skema tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan jaringan, kelayakan investasi, dan perkembangan teknologi dalam jangka panjang.

“Terkait ISP yang menjamur, pemda bisa mempertimbangkan skema menara bersama atau utilitas terpadu, namun tentu harus diawali kajian kelayakan investasi dan analisis teknologi jangka panjang agar tidak mubazir,” jelas Boby.

Balmon Kendari juga menegaskan bahwa titik koordinat hasil pengujian berkala atau drive test digunakan untuk mengukur kualitas layanan operator seluler. Titik pengukuran tersebut tidak serta-merta menunjukkan lokasi menara fisik yang telah berizin. Karena itu, pemetaan kualitas sinyal harus dibedakan dari pendataan dan verifikasi perizinan infrastruktur.

Secara historis, penataan telekomunikasi di Indonesia memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang kemudian mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, yang antara lain mengatur pemanfaatan infrastruktur pasif. Kerangka tersebut menjadi konteks penting bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang selaras dengan regulasi nasional.

Di tingkat internasional, berbagi infrastruktur fisik telah menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan efisiensi pembangunan jaringan telekomunikasi. International Telecommunication Union (ITU) menyoroti pemanfaatan bersama aset seperti menara, saluran kabel, dan komponen jaringan pasif sebagai cara menekan biaya pembangunan serta dampak lingkungan. Pendekatan tersebut relevan sebagai bahan kajian Baubau, meskipun penerapannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi geografis, kebutuhan layanan, dan kemampuan pembiayaan daerah.

Sebagai tindak lanjut, Diskominfo Baubau dan Balmon Kendari sepakat melakukan pencocokan data secara berkala. Pemerintah Kota Baubau juga mendorong penyusunan master plan telekomunikasi agar pembangunan infrastruktur lebih terarah. Penataan tersebut diharapkan mendukung peningkatan kualitas layanan, pemerataan akses komunikasi, serta optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan infrastruktur pasif sesuai ketentuan yang berlaku. (*)